



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2014**



**DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI BALI
2015**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Keterlibatan semua pihak sangat membantu dalam penyusunan LAKIP ini, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bidang di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Sekretariat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta semua staf Dinas PU Provinsi Bali yang membantu secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014.

Disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi rencana kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2014. Semoga untuk tahap selanjutnya dapat diperoleh data-data dan informasi yang maksimal dari Dinas PU Provinsi Bali sehingga dapat menghasilkan LAKIP yang lebih baik.

Denpasar, 1 Maret 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bali,

Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI	
1.1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Issu Strategis.....	3
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2014	1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	1
3.2. Analisis Capaian Kinerja	4
3.3. Realisasi Keuangan	26
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali	
Lampiran II : Penetapan Kinerja Tahun 2014	



BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali merupakan SKPD yang melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur jalan maupun infrastruktur irigasi. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bali, dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diterbitkannya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sehubungan dengan itu, Dinas PU Provinsi Bali beserta jajarannya dalam kelompok penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sudah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas PU Provinsi Bali periode tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan awal tahun.

LAKIP ini berupa dokumentasi hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta Rangkuman hasil kinerja masing – masing Bidang, Sekretariat, dan UPT sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Surat Keputusan MENPAN Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laboran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pergub Nomor 72 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan Pergub Nomor 100 Tahun 2011 tentang organisasi dan rincian tugas pokok UPT dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. pengelolaan dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang pekerjaan umum;
- d. pembinaan pelaksana tugas sesuai dengan bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.3. ISSU STRATEGIS

Beberapa Issu Strategis yang muncul pada Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penataan jaringan sarana dan prasarana transportasi serta infrastruktur lainnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat;
2. Peningkatan/optimasi kapasitas jaringan jalan dan outlet transportasi (bandar udara, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan laut)
3. Optimalisasi angkutan umum terintegrasi;
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi;
5. Pengembangan dan pengelolaan fasilitas olah raga dan kesehatan;
6. Optimalisasi pengembangan fungsi jaringan irigasi;
7. Peningkatan pengamanan pantai.

Permasalahan yang dihadapi secara umum Dinas Pekerjaan Umum yang mempengaruhi capaian kinerjanya antara lain :

1. Pemanfaatan sistem penyediaan air minum khususnya SPAM Telagawaja dan Guyangan belum berjalan secara optimal, tingkat pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat masih rendah.
2. Belum dapat diselesaikannya Pembangunan SPAM Penet Unit Distribusi di Kabupaten Badung.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas PU;
2. Bidang Pengkajian dan Jasa Konstruksi;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Bina Marga;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. UPT. Balai Peralatan dan Pengujian;
9. UPT. Pengelolaan Air Minum;
10. UPT. Pengelolaan Air Limbah;
11. UPT. Pengelolaan Sampah.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdapat pada **Lampiran 1**

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali selama Tahun 2014. Capaian Kinerja Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 (hasil review) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PU Provinsi Bali mempunyai 18 (delapan belas) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan Kinerja tahun 2014 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di masing – masing bidang.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 terdiri dari 16 sasaran, namun dalam tahun berjalan setelah direview menjadi 10 (sepuluh) sasaran, sehingga perlu juga dilakukan review terhadap Renstra SKPD 2014 -2018, dimana hal tersebut juga berpengaruh terhadap Penetapan Kinerja 2014 yang telah dibuat di awal tahun. Setelah adanya review terhadap Penetapan Kinerja 2014 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menetapkan 10 sasaran strategis yang ingin dicapai , yaitu sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1	
Mantapnya kondisi Infrastruktur	
Indikator Kinerja	Target
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	55%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	140.000 m3
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	81,80 %
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	35,00 %
Prosentase lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)gedung negara dan lingkungan	62,00 %
SASARAN STRATEGIS 2	
Meningkatnya pengendalian abrasi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	53,06 %
SASARAN STRATEGIS 3	
Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %
SASARAN STRATEGIS 4	
Ketersediaan dan kecukupan insfrastruktur.	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	68,00 %
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	71,00 %

Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	60,00 %
Prosentase elektrifikasi	80,62 %
SASARAN STRATEGIS 5	
Meningkatnya energi baru terbarukan	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,10 MW
SASARAN STRATEGIS 6	
Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase rumah layak huni yang terjangkau	64,00 %
Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (sesuai persyaratan)	64,00 %
SASARAN STRATEGIS 7	
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	25,00 %
SASARAN STRATEGIS 8	
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	60,00 %
SASARAN STRATEGIS 9	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %

Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %
SASARAN STRATEGIS 10	
Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	75 orang

Terdapat perbedaan sasaran yang ditetapkan antara Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani pada Tanggal ... Januari 2014 dengan Penetapan Kinerja Hasil Review pada bulan Nopember 2014. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan hasil Review Renstra SKPD 2013 -2018 dan penyempurnaan indikator kinerja utama yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum saat ini.

Indikator Kinerja dan sasaran yang digunakan dalam pengukuran kinerja (LAKIP Dinas PU) Tahun 2014 adalah **Penetapan Kinerja hasil review**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas PU Provinsi Bali tahun 2014 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2014 dengan realisasinya. Dalam pengukuran kinerja tahun ini digunakan indikator kinerja pada Penetapan Kinerja hasil Review Tahun 2014. Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Mantapnya kondisi Infrastruktur			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	55%	56,85%	103,36
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	140.000 m3	160.616m3	114,72
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	81,80 %	82,64 %	101,02
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	35,00 %	8,89 %	25,4

Prosentase lingkungan perumahan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) gedung negara dan lingkungan	62,00 %	58,00 %	93,54
--	---------	---------	-------

SASARAN STRATEGIS 2**Meningkatnya pengendalian abrasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	53,06 %	54,15%	102,05

SASARAN STRATEGIS 3**Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00

SASARAN STRATEGIS 4**Ketersediaan dan kecukupan insfrastruktur.**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	68,00 %	59,68 %	87,76
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	71,00 %	60,70 %	85,49
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	60,00 %	52,00%	86,66
Prosentase elektrifikasi	80,62 %	82,18 %	101,94

SASARAN STRATEGIS 5**Meningkatnya energi baru terbarukan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,10 MV	2,29MV	108,86

SASARAN STRATEGIS 6			
Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase rumah layak huni yang terjangkau	64,00 %	60,00%	93,75
Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (sesuai persyaratan)	64,00 %	38,50%	60,16

SASARAN STRATEGIS 7			
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	25,00 %	28,00 %	112

SASARAN STRATEGIS 8			
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	60,00 %	64,00%	106,67

SASARAN STRATEGIS 9			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	118,78%	118,78
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100,00 %	100
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	100,00 %	100
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %	51,94 %	51,94

SASARAN STRATEGIS 10			
Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	75 orang	71 orang	94,66

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Mantapnya kondisi Infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)
2. Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m³)
3. Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)
4. Prosentase kehandalan bangunan gedung negara
5. Prosentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	55%	56,85%	103,36%

Target yang ditetapkan adalah 55%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 56,85% dari target yang ditetapkan. Rasio Jaringan Irigasi dalam hal ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi keseluruhan x 100%.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 56,85% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 9,15%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Yeh Leh di Kab. Tabanan/Jembrana
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Balian di Kab. Tabanan
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Palasari di Kab. Jembrana
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Oongan Kab. Badung/Denpasar
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kab. Buleleng

Selain pekerjaan diatas, untuk mencapai target indikator tersebut juga dilaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rumah jaga bendung D.I. Pama Paealan di Kab. Badung / Tabanan
2. Perbaikan saluran saluran dan pintu air D.I. Cangi di Kab. Badung / Tabanan
3. Pemeliharaan rumah jaga bendung D.I. Balian di Kab. Tabanan
4. Perbaikan saluran, pintu air D.I. Benel di Kab. Jembrana
5. Perbaikan rumah jaga dan pintu air D.I. Pejeng di Kab. Gianyar

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah secara umum penutupan air tidak ditepati oleh subak sesuai dengan yang telah disepakati dalam waktu sosialisasi pelaksanaan kegiatan, karena petani sudah melakukan kegiatan tanam padi, disamping itu kondisi topografi saluran irigasi cukup ekstrim dan jarak angkut bahan yang cukup sulit. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi akan adanya pekerjaan rehab jaringan baik formal maupun tidak formal pada petani/subak yang kena dampak proyek.

✓ ***Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	140.000 m3	160.616m3	114,72

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 140.000 m3. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian penambahan kapasitas penyediaan air baku adalah 160.616m3 atau sebesar 114,72% dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 160.000m3 sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 160.616 m3 sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 616m3.

Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan penambahan kapasitas penyediaan air baku pada tahun 2014 ini pendanaannya bersumber dari APBN Kementerian PU/ Dirjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan dari APBD dianggarkan untuk pemeliharaan saja terhadap 4 (embung) yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah masalah pembebasan lahan/tanah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah perlu koordinasi yang lebih intensip dengan kab./kota dan masyarakat sekitarnya mengenai manfaat pembangunan embung/waduk terkait dengan penambahan penyediaan air baku.

✓ *Prosentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	81,80 %	82,64	101,02%

Target yang ditetapkan pada indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2014 adalah 81,80 %.

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 860,53 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 363,07 km, kondisi sedang 348,03 km dan kondisi rusak sepanjang 149,43 km.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 82,64 % atau sebesar 101,02 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 89,78% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 82,64% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 7,14%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan peningkatan jalan sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Provinsi Pekseballi-Selat 1,50 Km
2. Peningkatan Jalan Provinsi 7,00Km di Kabupaten Karangasem (Rendang-Subagan, Jl.K.H.Samanhudi,Jl. Nenas)
3. Peningkatan Jalan dan Pelebaran Jembatan Provinsi 1,50 Km dan 30,00 M' di Kabupaten Karangasem (Amlapura-Seraya-Culik dan Jembatan Tukad Canggih)
4. Peningkatan Jalan Provinsi 4,00 Km di Kabupaten Bangli (Sidan-Bangli dan Jalan Merdeka Bangli)

5. Peningkatan Jalan Provinsi 5,00 Km di Kabupaten Bangli (Bangli- Penelokan dan Bangli-Nongan/ Jln.Airlangga)
6. Peningkatan Jalan Provinsi Gempol- Banyuning-Penarukan 2,50 Km
7. Peningkatan Jalan Provinsi Petang- Batunya 3,50 Km
8. Peningkatan jalan Provinsi 5,75 Km di Kabupaten Badung (Denpasar- Petang dan Jalan Akses Jembatan Tukad Penet)
9. Peningkatan Jalan Provinsi Surabrata - Blatungan - Kemoning 5,00 Km
10. Peningkatan Jalan Provinsi Pengambengan-Cupel-Banyubiru 2,50 Km
11. Peningkatan Jalan Provinsi 5,00 Km di Kabupaten Gianyar dan Bangli (Bedahulu-Sribatu dan Bangli-Sribatu)

Selain pekerjaan peningkatan jalan juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan provinsi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Antosari-Pupuan 3,00 Km (DAK)
Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Antosari-Pupuan 3,00 Km (Pendamping)
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Tabanan-Buruan-Batukaru 3,00 Km
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Kedewatan Payangan-Baturanyar 3,00 Km
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Tegaltamu-Kedewatan 3,70 Km (DAK)
Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Tegaltamu-Kedewatan 3,70 Km (Pemdamping)
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kota Denpasar 5,70 Km (Jl. Gunung Agung-Gunung Sanghyang dan Denpasar-Sanur dan Perbaikan Oprit Jembatan Tukad Teba Ruas Teuku Umar-Batubelig)
6. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Kabupaten Gianyar 8,70 Km (Ubud-Tegallalang-Bubungbayung dan Kedewatan Ubud)

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Klungkung-Besakih Km. 55+990
2. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Surabrata-Blatungan Km. 66+150
3. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Penelokan-Kubutambahan Km. 103+700 dan Km. 106+150
4. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Tampaksiring-Tegallalang dan Bedahulu-Sribatu Km. 41+300

5. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Paksebali-Selat Km. 50+700
6. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Penelokan-Kubutambahan Km. 70+900
7. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Buruan-Gianyar Km. 25+050
8. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Pupuan-Seririt Km. 79+300
9. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Antosari-pupuan Km. 22+050
10. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Ubud-Tegallalang-Bubungbayung Km. 38+700
11. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Penelokan-Kubutambahan Km. 61+125
12. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Wanagiri-Munduk-Mayong Km. 59+200, Km. 70+800
13. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Sidan-Bangli Km. 35+850
14. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Petang-Batunya Km. 42+100 dan Km. 43+200
15. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Tabanan-Buruan-Batukaru Km. 22+300
16. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Dausa-Madenan-Bondalem Km. 83+300, Km. 85+800 dan Km. 88+800
17. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Puputan Batas Kota Semarapura Km. 39+725.
18. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 (Sembilan) Kab/Kota Ruas Jalan Pupuan Seririt Km. 75+300.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah terjadinya bencana alam tanah longsor, akibat derasnya hujan di penghujung tahun 2014. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah dengan melakukan relokasi jalan yang berada pada titik-titik rawan bencana.

✓ *Prosentase kehandalan bangunan gedung negara*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	35,00 %	8,89 %	25,4

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 35,00 %. Jumlah bangunan gedung negara dan lingkungan di provinsi bali sebanyak 225 unit. Sampai tahun 2014 yang dalam kondisi baik sebanyak 20 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase kehandalan bangunan gedung negara dan lingkungan adalah sebesar 8,89 % atau sebesar 25,4 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,61% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 8,89% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 66,72%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan sebagai berikut :

1. Penataan Lingkungan Kantor Gubernur dan Lapangan Tennis
2. Rehabilitasi Gedung GOR Selatan Ngurah Rai Denpasar
3. Rehabilitasi Monumen Bajra Sandhi Denpasar
4. Rehabilitasi Gedung Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
5. Penataan Pura Pucak Mangu Kec. Petang Kab. Badung.
6. Pembangunan Balai Pengaruman di Besakih Kab. Karangasem
7. Penataan Pura Uluwatu Kab. Badung.
8. Penataan Pura Andakasa Kab. Karangasem.
9. Penataan Pura Goa Lawah Kab. Klungkung.
10. Penataan Pura Batur Kab. Bangli.
11. Penataan Pura Kebontingguh Kab. Tabanan
12. Penataan Pura Pucak Kedaton Desa Pujungan Kec. Pupuan, Kab. Tabanan
13. Penataan Pura Banjar Tundak Kab. Tabanan
14. Penataan Pura Luhur Mekori Desa Belimbing Kab. Tabanan
15. Penataan Pura Pucak Tinggah Angsri Kec. Baturiti, Kab. Tabanan
16. Penataan Pura Pucak Sangkur Kec. Baturiti, Kab. Tabanan
17. Penataan Pura Bukit Kec. Baturiti, Kab. Tabanan
18. Penataan Pura Pucak Taman Sebatu Kec. Baturiti, Kab. Tabanan
19. Penataan Pura Pucak Sari Kec. Penebel, Kab. Tabanan
20. Penataan Pura Besi Kalung Kec. Penebel, Kab. Tabanan
21. Penataan Pura Jegu Kec. Penebel, Kab. Tabanan

22. Penataan Pura Bukit Adeng Senganan Kec. Penebel, Kab. Tabanan
23. Penataan Pura Dalem dan Prajapati Desa Pakraman Pangreregan Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan
24. Penataan Pura Bedugul Desa Pakraman Pujungan Kec. Pupuan, Kab. Tabanan
25. Penataan Pura Tirta Empul Hulu Kab. Jembrana
26. Penataan Pura Danau Bulian Desa Panca Sari Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
27. Penataan Pura Kahyangan Jagat Pengukur Ukur Pejeng Kelod Kab. Gianyar
28. Penataan Pura Prajapati Desa Pakraman Kesian Kab. Gianyar
29. Penataan Pura Silayukti Desa Padang Bai, Kec. Manggis, Kab. Karangasem
30. Penataan Pura Luhur Lempuyang Desa Tista Kec. Abang Kab. Karangasem
31. Penataan Pura Bibis Desa Seraya Kab. Karangasem
32. Penataan Pura Pucak Sari Goa Lawah Kab. Klungkung
33. Penataan Pura Dalem Siladri Desa Bakas, Banjarangkan Kab. Klungkung
34. Penataan Pura Cri Serengga Desa Adat Nyalian Banjarangkan Kab. Klungkung
35. Penataan Pura Batu Klotok Kab. Klungkung
36. Penataan Pura Antap Desa Takmung Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung
37. Penataan Pura Agung Dalem Bakas Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung
38. Penataan Pura Alas Arum Batur Desa Batur Kec. Kintamani, Kab. Bangli
39. Penataan Pura Dalem Balingkang Kec. Kintamani, Kab. Bangli

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah alokasi dan yang diberikan tidak mencukupi untuk melaksanakan target yang harus dipenuhi. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah meningkatkan alokasi dana agar tercapai realisasi sesuai target, menyeleksi dan memprioritaskan kegiatan yang harus dilaksanakan.

✓ *Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	62,00 %	58,00 %	93,54

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 62,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman

yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah sebesar 58,00% atau sebesar 93,54% dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 70,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 58,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 12,00%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Perumahan pada Bidang Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut :

1. Penyusunan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. Penyusunan / Pemutahiran Data Base PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah belum terkoordinasinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang terkait, sehingga sinkronisasi data kebutuhan PSU belum maksimal dan Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah pada Bidang tata ruang dan perumahan akan dilaksanakan kegiatan "Survei kesesuaian norma dan kebutuhan PSU perumahan pada kawasan perkotaan", dengan tujuan mengakomodir kebutuhan PSU perumahan pada Pemerintah Provinsi Bali

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengendalian abrasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)	53,06 %	54,15%	102,05

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 53,06 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi adalah sebesar 54,15% atau sebesar 102,05% dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 57,46% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 54,15% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 3,31%.

Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengamanan pantai yang telah tertangani s/d tahun 2014 sepanjang 96,698km yang pendanaannya bersumber dari APBN

Kementerian PU/ Dirjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan dari dana APBD s/d tahun 2014 ini sepanjang 1,694km. Pada tahun 2014 untuk mencapai target tersebut Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pekerjaan pada kegiatan pengamanan pantai sebagai berikut :

1. Pengamanan Pantai Kedungu - Pangkung Tibah di Kab. Tabanan
2. Pengamanan Pantai Sengkidu di Kab. Karangasem

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah penggunaan akses/jalan masuk untuk mengangkut material milik desa adat sering dikomersilkan sehingga upaya yang dilakukan pada tahun berikutnya adalah perlu penambahan koordinasi yang lebih intensif dengan desa adat setempat disamping itu perlu penambahan sering pendanaan dari APBD Provinsi Bali terkait penanganan pengamanan pantai, karena pantai di Bali dari segi ritual keagamaan sangat diperlukan masyarakat terkait aset budaya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tersebut pada tahun 2014 melalui dan APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengamanan Pantai di Kabupaten Buleleng
2. Studi Potensi Embung di Kabupaten Buleleng, Jembrana
3. Perencanaan Jaringan Irigasi Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar
4. Pemutahiran Data Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi D.I. Tembuku, D.I. Balian, D.I. Mertagangga, D.I. Praupan, dan D.I. Margaya
5. Perencanaan Pengamanan Mata Air di Kab. Klungkung, Karangasem dan Bangli
6. Pengawasan Pengamanan Pantai di Kab. Tabanan
7. Pengawasan Pengamanan Pantai di Kab. Karangasem
8. Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Balian di Kab. Tabanan, DI. Palasari di Kab. Jembrana, dan DI. Yeh Leh di Kab. Jembrana/Tabanan
9. Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Oongan di Kota Denpasar, dan DI. Tiyingtali di Kab. Buleleng

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang adalah sebesar 100,00% atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai berikut :

1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang DAS Tukad Pakerisan
2. Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Goa Lawah
3. Review Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Agung Besakih

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah :

- Belum tersedianya aturan pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
- Kurangnya koordinasi antara kabupaten dan provinsi dalam bidang penataan ruang, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara pengaturan ruang satu dengan lainnya.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Melakukan konsultasi ke kementerian terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

- Meningkatkan koordinasi antara kabupaten dan provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai penataan ruang kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 4 : Ketersediaan dan ketercukupan infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali
2. Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali
3. Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali
4. Prosentase elektrifikasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	68,00 %	59,68 %	87,76

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 68,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali adalah sebesar 59,68 % atau sebesar 87,76 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 59,68% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 30,32%.

Untuk menunjang tercapainya target tersebut melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pemasangan Pipa tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah terbatasnya jumlah House Inlet yang tersedia sehingga pemasangan sambungan pelanggan yang dapat dilayani juga terbatas. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah memilih

pemasangan saluran tersier sehingga House Inlet dengan sambungan pelanggan lebih banyak bisa dilayani.

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	71,00 %	60,70 %	85,49 %

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 71,00 %. Jumlah penduduk provinsi bali sebanyak 4.043.622 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum sebanyak 2.454.639 orang. Tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali adalah sebesar 60,70 % atau sebesar 85,49 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 60,70% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 29,30%.

Untuk menunjang tercapainya target tersebut melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Penet Unit Distribusi
2. Pengembangan PS Air Minum Desa Busung Biu, Kec. Busungbiu
3. Pengembangan SPAM Desa Taro Kab. Gianyar
4. Pembangunan SPAM di Desa Pacung Kec. Tejakula Kab. Buleleng
5. Pengembangan SPAM di Desa Manukaya Anyar Kec. Tampaksiring Kab. Gianyar
6. Pengembangan SPAM Guyangan di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah adanya putus kontrak karena pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah untuk sisa pekerjaan akan dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2015.

✓ *Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	60,00 %	52,00%	86,66

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 60,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah sebesar 52,00% atau sebesar 86,66% dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 85,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 52,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 33,00%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai berikut :

1. Pengadaan tong sampah di daerah kawasan Pariwisata
2. Pengadaan peralatan pengolah sampah (Buleleng)
3. Pengadaan tong sampah (9 kab/Kota)
4. Pengadaan gerobak Sampah (9 kab/kota)
5. Pengadaan Pick Up Dump
6. Pengadaan dump truk
7. Pembangunan depo pengolah sampah (Buleleng)
8. Pengadaan Mesin Potong Rumput

Selain itu juga untuk mencapai target yang ditetapkan juga dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan peningkatan Fasilitas Pengelolaan Persampahan di TPA Regional sebagai berikut :

1. Pengadaan excavator dan wheel loader
2. Pengadaan dump truk
3. Pengadaan pick up dump (TPA reg sarbagita)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan persampahan, keterbatasan anggaran dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya (3R) masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah menambah sarana dan prasaran pendukung pengolahan persampahan, menambah anggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

✓ **Prosentase elektrifikasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase elektrifikasi	80,62 %	82,18%	101,94

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 80,62 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase elektrifikasi adalah sebesar 82,18 % atau sebesar 101,94 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,60% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 82,18% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 8,42%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan.

- Peningkatan ratio elektrifikasi selain dari dana APBD Provinsi Bali, juga oleh Kegiatan :
 - a. DAK Energi Perdesaan di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, Klungkung
 - b. PT. PLN Persero (Distribusi Bali)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah keterbatasan pembiayaan melalui pembiayaan APBD. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah meningkatkan rumah tangga berlistrik di luar jangkauan jaringan PLN secara maksimal.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya energi baru terbarukan

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ **Jumlah kapasitas energi baru terbarukan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,10 MW	2,29MW	108,86

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 2,10 MV. Jumlah pengadaan dan pemasangan Solar Home System sampai tahun 2014 di provinsi Bali sebanyak 3320 unit. Selain itu juga ada pembangunan PLTS Terpusat dengan kapasitas 15 KW sebanyak 6 unit dan kapasitas 1 MW sebanyak 2 unit.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 2,16MW sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 2,29MW sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 0,13MW.

Jumlah pembangunan Instalasi Biogas sampai tahun 2014 di Provinsi Bali sebanyak 1170 unit.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Jumlah kapasitas energi baru terbarukan adalah sebesar 2,29 % atau sebesar 108,86 % dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan mengembangkan kegiatan ketenagalistrikan sebagai berikut :

1. Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Kab. Karangasem (37 Unit)
2. Pembangunan Instalasi Biogas di Kab. Tabanan (2 Unit)
3. Pembangunan Instalasi Biogas di Kab. Karangasem (2 Unit)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 relatif tidak ada. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan jadwal.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Prosentase rumah layak huni
2. Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (layak menghuni)

Analisis capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase rumah layak huni*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase rumah layak huni	64,00 %	60,00 %	93,75

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 64,00 %. Jumlah rumah di provinsi bali sebanyak 1.028.260 unit. Dari jumlah tersebut sampai dengan tahun 2014 yang layak huni sebanyak 874.021 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase rumah layak huni adalah sebesar 60 % atau sebesar 93.75 % dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut telah

dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan seksi pengembangan kinerja perumahan sebagai berikut :

1. Penyusunan / Pemeliharaan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
2. NSPM Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah masih perlu banyak kajian yang harus dilakukan dalam kepastian data yang akurat, terkait penanganan di bidang perumahan (rumah layak huni, rumah layak huni yang terjangkau, kesesuaian norma perumahan dll) Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah :

1. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten pada Provinsi Bali, guna tercapainya pembangunan perumahan permukiman yang berlanjut dan berkesinambungan.
3. Mengikuti perkembangan perumahan terkini dari berbagai sumber, sehingga dapat terkumpul data yang ter-kompilasi.

✓ *Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (sesuai persyaratan)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (sesuai persyaratan)	64,00 %	38,50 %	60,16

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 64,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (layak menghuni) adalah sebesar 38,50% atau sebesar 60,16% dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan seksi pengembangan kinerja perumahan yaitu Pendampingan terhadap program-program Kemenpera.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah belum dapat kegiatan yang menyentuh langsung (fisik) program rumah layak huni yang terjangkau, dimana kami hanya dapat menyiapkan data perumahan dan permukiman. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meng-sinergikan program kinerja pengembangan perumahan, dengan perencanaan yang telah tersusun (paket kegiatan).

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	25,00 %	28,00%	112,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 25,00%. Jumlah usaha pertambangan di provinsi bali 158 buah. Jumlah usaha pertambangan yang memiliki izin 44 buah, dan yang belum memiliki izin 113 buah. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin adalah sebesar 28 % atau sebesar 112 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 28,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 47,00%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah terbatasnya upaya penertiban yang dilakukan dari pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	60,00 %	64,00 %	106,67

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 60,00%. Jumlah izin pemanfaatan air tanah di provinsi bali 1229 buah. Dari jumlah tersebut telah dilengkapi rekomendasi teknis sebanyak 639 buah, sedangkan ijin pemanfaatan air tanah yang belum dilengkapi rekomendasi teknis sebanyak 389 buah. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis adalah sebesar 64 % atau sebesar 106,67 % dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 80,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 64,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 16,00%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan pembinaan dan evaluasi pemanfaatan air tanah sebagai berikut :

1. Evaluasi Sumur Pantau di Provinsi Bali
2. Updating Data dan Informasi Air Tanah Provinsi Bali
3. Perbaikan 18 unit sumur pantau di Prov. Bali
4. Pekerjaan Pembuatan Peta Zonasi Pemanfaatan Air Tanah

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah keterbatasan personalia teknis dalam bidang geologi dan pertambangan serta sarana yang kurang memadai untuk peninjauan/monitoring lapangan. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah penambahan personil personalia teknis dalam bidang geologi dan pertambangan serta pengadaan sarana transportasi yang lebih memadai untuk operasional kegiatan

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat
2. Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah
3. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum
4. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	118,78%	118,78

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 pada indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium pengujian dan alat berat sebanyak 79 responden. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah sebesar 118,78% dari target yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dapat yaitu :

- Pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan bangunan dilaksanakan pekerjaan :
 1. Pengadaan Alat Geser Sudut Tanah & Index Tanah
 2. Pengadaan Alat Kuat tekan Mortal
- Pada kegiatan Pelaksanaan Pelayanan alat berat dilaksanakan pekerjaan :
 1. Pengadaan Vibro Compactor

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100%	100

Target yang ditetapkan indikator Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah 100,00%

Jumlah responden menggunakan pelayanan air limbah adalah sebanyak 7.833 responden dan menyatakan puas sebanyak 7.833 responden. Untuk tingkat capaian Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah sebesar 100% atau sebesar 100.%.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dapat yaitu :

- Kegiatan Operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah dilaksanakan pekerjaan :
 1. Survey penambahan dan peningkatan kebutuhan sambungan rumah di wilayah Denpasar, Sanur, dan Kuta
- Kegiatan Validasi data dan Penyebaran invoice dilaksanakan pekerjaan :
 1. Validasi data pelanggan dan penyebaran invoice di Wilayah Sanur
 2. Validasi data pelanggan dan penyebaran invoice di Wilayah Denpasar
 3. Validasi data pelanggan dan penyebaran invoice di Wilayah Kuta
- Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi dilaksanakan pekerjaan :
 1. Sosialisasi di Wilayah Denpasar
 2. Sosialisasi di Wilayah Sanur
 3. Sosialisasi di Wilayah Kuta

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	100,00 %	100

Target yang ditetapkan untuk indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah 100,00%.

Jumlah responden yang menggunakan pelayanan air minum sebanyak 3 responden yaitu PDAM Badung, Denpasar dan Gianyar dan yang menyatakan puas sebanyak 3 responden, untuk tingkat capaian Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tersebut dapat yaitu :

- Kegiatan Operasional Pemeliharaan Prasarana dan sarana Air Minum dilaksanakan pekerjaan :
 1. Pengadaan Bahan Kimia
 2. Pengadaan dan Pemasangan Watermeter pada SPAM Guyangan.
 3. Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Petanu.
 4. Operasional dan Peeliharaan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Guyangan dan SPAM Telagawaja.
- Pada kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pekerjaan :

1. Penyusunan Sistem Evaluasi Kapasitas Air dan Pengembangan Pelayanan SPAM
2. Penyusunan Sistem Pendapatan dan Biaya SPAM Telagawaja
3. Penyusunan Sistem Pendapatan dan Biaya SPAM Guyangan
4. Penyusunan Sistem Pendapatan dan Biaya SPAM Petanu
5. Pembuatan Web Site SPAM
6. Biaya Analisis Laboratorium Kualitas Air

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah :

- Belum ditandatangani Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk SPAM Telagawaja, SPAM Guyangan dan SPAM Penet.
- Sistem Jaringan yang belum sempurna.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah :

- Kordinasi untuk mempercepat penyelesaian KB dan PKS untuk SPAM Telagawaja, SPAM Guyangan dan SPAM Penet.
- Penyempurnaan Sistem Jaringan SPAM.

✓ *Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	51,94 %	51,94

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebesar 51,94% dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah, dan anggaran sangat terbatas. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan peningkatan Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah, dan peningkatan anggaran.

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara jasa konstruksi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat	75 orang	71 orang	94,67

Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 75 orang. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Jumlah SDM penyelenggara jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat adalah sebanyak 71 orang atau sebesar 94,67% dari target yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 125 orang sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 71 orang, sehingga target yang harus dicapai dalam 4 tahun kedepan sebesar 54 orang.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimtek Pemanfaatan Air Tanah yang berwawasan lingkungan dengan jumlah peserta 25 orang.
2. Bimtek Pelaksanaan Jalan dan Jembatan dengan jumlah peserta 24 orang.
3. Bimtek Pemberdayaan dan Pelatihan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan jumlah peserta 22 orang.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah :

- Kabupaten Jembrana tidak menugaskan / mengirimkan peserta Bimtek SIPJAKI (2 orang) dan Kabupaten Bangli hanya mengirimkan 1 orang dari yang diundang 2 orang calon peserta.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2015 adalah mengintensifkan komunikasi, koordinasi serta penyebarluasan informasi mengenai regulasi dan pola penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

3.2. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2014 adalah sebesar Rp. 368.941.628.100,- (Tiga ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 4.458.000.000,-
 - Belanja barang /jasa Rp. 82.793.585.100,-
 - Belanja Modal Rp. 281.690.123.000,-
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 312.968.678.374,97 (tiga ratus dua belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 84,83% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 4.318.915.000,-
 - Belanja barang /jasa Rp. 65.265.076.356,-
 - Belanja Modal Rp. 243.384.678.018,97

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2014

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.082.214.000,00	4.407.043.056,00	86,72
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.830.834.000,00	6.503.919.586,00	95,21
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	124.700.000,00	110.257.800,00	88,42
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	233.000.000,00	139.278.950,00	59,78
5	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	327.954.000,00	268.240.210,00	81,79
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	22.465.280.000,00	16.767.531.800,00	74,64
7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	5.979.400.000,00	4.752.281.150,00	79,48
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	74.717.010.600,00	50.351.801.891,00	67,39
9	Program Pengendalian Banjir	7.991.000.000,00	7.977.416.900,00	99,83
10	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	570.000.000,00	494.632.250,00	86,77
11	Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	1.687.571.500,00	1.282.736.617,00	76,01

12	Program kehumasan Ke-PU-an	114.160.000,00	89.141.600,00	78,08
13	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3.096.275.000,00	2.382.893.240,00	76,96
14	Pengembangan Jasa Konstruksi	835.199.000,00	495.994.855,00	59,39
15	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	9.009.250.000,00	6.779.127.200,00	75,25
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.049.704.000,00	7.558.037.950,00	93,89
17	Program Penataan Bangunan	18.532.000.000,00	14.484.303.310,00	78,19
18	Program Perencanaan Tata Ruang	1.521.850.000,00	1.329.423.550,00	87,36
19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	86.610.476.000,00	81.783.970.250,00	94,43
20	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	5.075.150.000,00	4.677.034.450,00	92,16
21	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	108.281.600.000,00	98.729.922.349,97	91,18
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	70.000.000,00	66.515.100,00	95,02
23	Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	220.000.000,00	204.492.500,00	92,95
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum	1.053.000.000,00	909.069.900,00	86,33
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	464.000.000,00	423.596.300,00	91,29
Total		368.941.628.100,00	312.968.678.374,97	84,83

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di tahun 2014 melaksanakan sebanyak 25 program yang terdiri dari 110 kegiatan. Pagu anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp. 368.941.628.100,- dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 312.968.678.374,97 atau sebesar 84,83%

Anggaran dan Realisasi pada masing-masing bidang
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali 2014

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Sekretariat	4.994.599.600,00	4.679.558.222,00	93,69
II.	Bidang Pengkajian dan jasa Konstruksi	1.956.495.100,00	1.366.373.505,00	69,84
III.	Bidang Sumber Daya Air	36.645.680.000,00	29.631.815.550,00	80,86
IV.	Bidang Bina Marga	200.204.669.600,00	185.321.779.549,97	92,57
V.	Bidang Cipta Karya	87.201.633.800,00	63.449.690.980,00	73,76
VI.	Bidang Tata Ruang	2.200.750.000,00	1.922.076.300,00	87,34
VII.	Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.928.900.000,00	1.716.727.967,00	89,00
VIII.	UPT. Balai Peralatan dan Pengujian	3.924.800.000,00	3.146.147.807,00	80,16
IX.	UPT. Pengelolaan Air Minum	14.066.700.000,00	7.356.598.118,00	52,30
X.	UPT. Pengelolaan Air Limbah	6.909.000.000,00	6.063.175.565,00	87,76
XI.	UPT. Pengelolaan Sampah	8.908.400.000,00	8.314.734.811,00	89,16
	Jumlah total	368.941.628.100,00	312.968.678.374,97	84,83

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2014
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	2.203.000.000,00	6.046.839.824,00	274,48
	Total Pendapatan	2.203.000.000,00	6.046.839.824,00	274,48
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	40.603.751.642,00	35.212.937.747,00	86,72
	2. Belanja Langsung :	368.941.628.100,00	312.968.678.374,97	84,83
	a. Belanja Pegawai	4.458.000.000,00	4.270.815.000,00	95,80
	b. Belanja Barang dan Jasa	82.793.505.100,00	65.399.199.356,00	79,99
	c. Belanja Modal	281.690.123.000,00	243.298.664.018,97	86,37
	Total Belanja	409.545.379.742,00	348.181.616.121,97	85,02
	Surplus/Defisit	407.342.3793742,00	342.134.776.297,97	83,99

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 6.046.839.824,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar Rp.2.819.489.456,00 pendapatan tahun 2014 kurang lebih dua kali lipat pendapatan sebelumnya.

2. Realisasi Belanja

- Belanja Tidak Langsung

Pagu anggaran untuk belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 40.603.751.642,00 dimana realisasi per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 35.212.937.747,00 atau sebesar 86,72% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang realisasinya sebesar Rp. 32.776.826.934,00 atau sebesar 87,26%.

- Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Pada tahun 2014 pagu anggaran adalah sebesar Rp. 368.941.628.100,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.312.968.678.374,97 atau sebesar 84,83% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang realisasinya sebesar Rp. 347.250.511.011,00 atau sebesar 91,24%.

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Terdapat efisiensi dari paket pekerjaan yang dikontrakkan.
- Terjadinya pemutusan kontrak pada kegiatan pengembangan distribusi air minum.
- Adanya sisa untuk pembayaran listrik dan bahan kimia pada kegiatan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana air minum.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU Provinsi Bali tahun 2014 merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditetapkan sesuai Rencana Strategik (Renstra) Dinas PU Provinsi Bali tahun 2013-2018.

Capaian indikator kinerja terhadap 10 (sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal Tahun Anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 90%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 90%, namun semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2013-2018.

Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana APBD sebesar sebesar Rp. 368.941.628.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 312.968.678.374,97 atau sebesar 84,83% sehingga terjadi efisiensi sebesar 15,17 %.

Pada LAKIP tahun 2014 kali ini tidak membandingkan capaian indikator kinerja secara terperinci dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena banyaknya perbedaan-perbedaan indikator kinerja dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun diharapkan untuk LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di tahun berikutnya, akan menyampaikan perbandingan pencapaian kinerja masing-masing indikator yang ditetapkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum perbandingan dengan tahun sebelumnya disampaikan hanya pada realisasi anggran saja.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan apraiser agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Meningkatkan forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi serta peningkatan mutu SDM.
3. Penyusunan OE (Owner Estimate) yang lebih cermat, memperhatikan kondisi lingkungan dimana kegiatan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Perlu lebih ditingkatkan rapat koordinasi terpadu di jajaran Dinas PU Provinsi Bali, terkait dengan peraturan mengenai tata cara dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
5. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program / kegiatan prioritas terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.



LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Tahun 2014

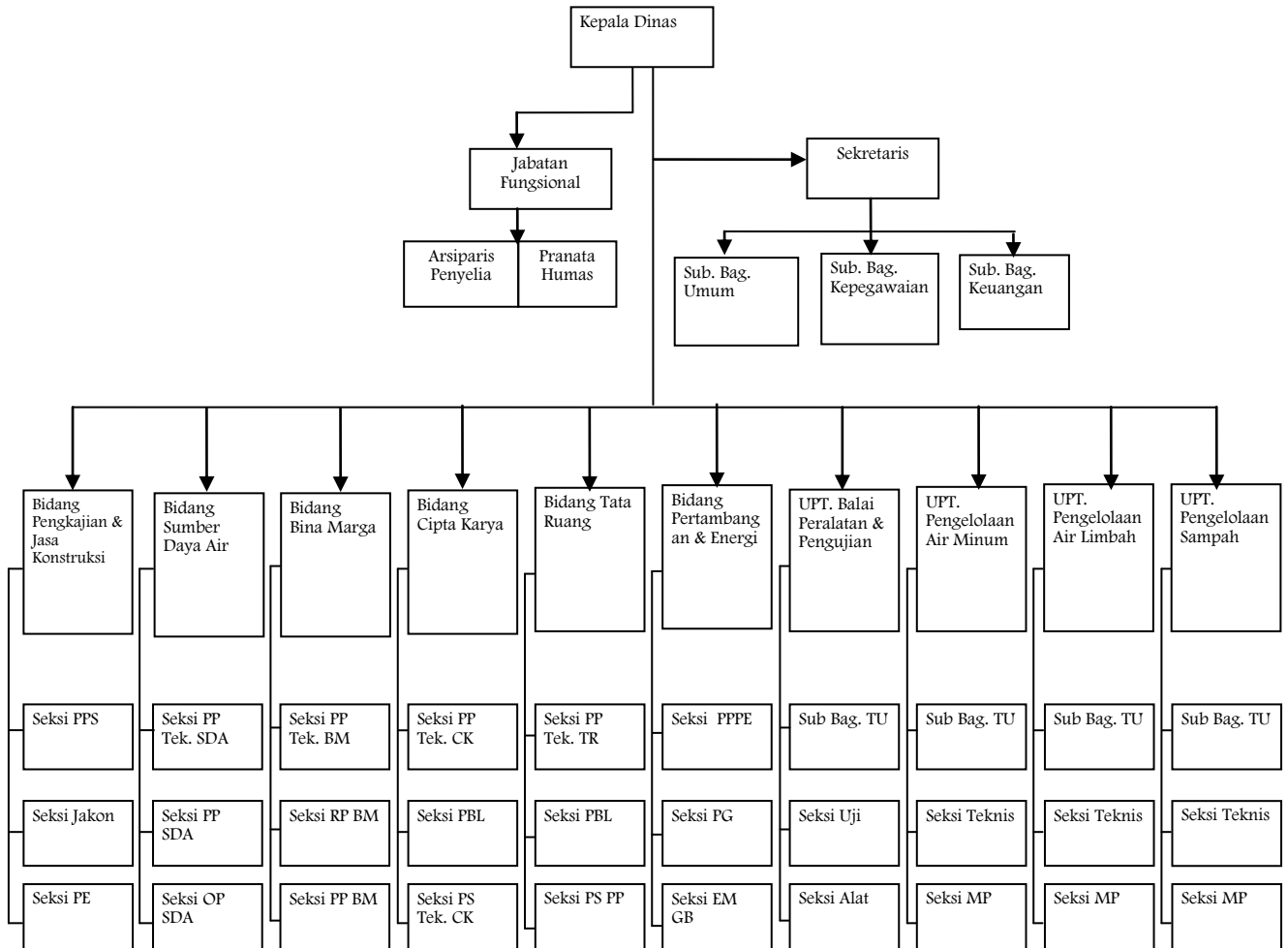


Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Tahun 2014

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PU Provinsi Bali



LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

Tahun 2014

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
: 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Mantapnya kondisi Infrastruktur	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	55,00%	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.	15,817,259,000.00
				Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	3,326,941,360.00
	Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku	140.000 m3	Program Pengelolaan Sumber-Sumber Air dan Penyediaan Air Baku	Operasi dan pemeliharaan danau, waduk dan sumber daya air lainnya.	1,700,000,000.00
	Prosentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	81.80%	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi	94,435,421,530.00
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan Provinsi	108,278,000,000.00
	Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	35,00%	Program Penataan Bangunan	Penataan bangunan dan lingkungan.	20,430,678,000.00
	Prosentase lingkungan perumahan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	62,00%	Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	121,072,450.00
Meningkatnya pengendalian abrasi	Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	53,06%	Program pengendalian banjir	Pembangunan prasarana pengamanan pantai	5,998,902,700.00
Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi	Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100.00%	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana rinci tata ruang	1,161,565,940.00
Ketersediaan dan ketercukupan infrastrutur	Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	68.00%	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	7,976,458,000.00
	Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	65.00%		Pengembangan Distribusi Air Minum	18,756,368,000.00
	Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	60,00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan TPA Regional	2,473,680,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Prosentase elektrifikasi	80,62%	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.	Mengembangkan kegiatan ketenagalistrikan	255,699,700.00
Meningkatnya energi baru terbarukan	Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,10 MW	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.	Mengembangkan kegiatan ketenagalistrikan	255,699,700.00
Meningkatnya rumah layak huni yang terjangkau	Prosentase rumah layak huni dan terjangkau	100.00%	Program Pengembangan Rumah Layak Huni	Peningkatan Kualitas Kondisi Rumah	94,147,550.00
	Prosentase rumah layak huni yang dihuni oleh orang yang tepat (sesuai persyaratan)	100.00%	Program Pengembangan Rumah Layak Huni		
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi	Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	25.00%	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Batuan	182,964,770.00
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	60.00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah	358,994,800.00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100.00%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Pelayanan alat berat	1,977,953,920.00
	Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100.00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah	Sosialisasi dan Publikasi	389,209,200.00
	Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100.00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Air Limbah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	511,000,000.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100.00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	310,700,000.00
Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi	Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	75 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM	324,871,520.00

Jumlah Anggaran : Rp **389,756,780,100.00**

Denpasar, Januari 2014

,GUBERNUR BALI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bali

MADE MANGKU PASTIKA

.Ir. I NYOMAN ASTAWA RIADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002